

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

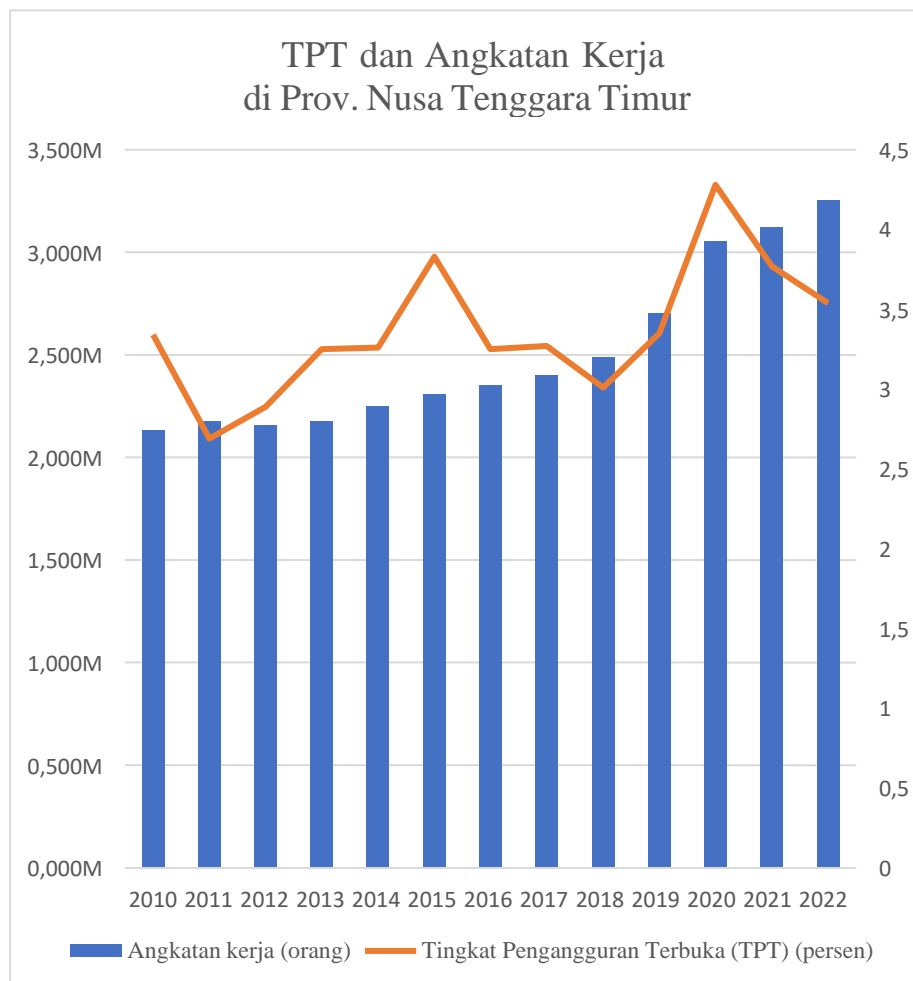
Beberapa berkembang seperti Indonesia contohnya berupaya untuk membuat ekonominya maju guna mencapai kemakmuran kesejahteraan bagi warga negaranya. Tujuan pembangunan ekonomi yakni untuk mengoptimalkan standar kehidupan para penduduk, membuka peluang kerja yang lebih luas, serta mengurangi kesenjangan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan di berbagai wilayah. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah seberapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan. SDM pun dijadikan indikator yang krusial pada proses pembangunan ekonomi namun ketika total penduduknya membesar tidak seimbang terhadap lapangan kerja yang tersedia hal tersebut bisa menjadi kendala, terutama bagi mereka yang mencari pekerjaan di usia produktif (Anamathofani, 2019).

Perluasan kesempatan kerja dibutuhkan dalam menyeimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk pada kategori usia muda sebagaimana memasuki pasar kerja. Ketidaksetaraan terkait pertumbuhan tenaga kerja serta pembukaan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Dampak dan peningkatan pengangguran tersebut adalah pemborosan SDM serta potensi tenaga kerja, meningkatkan beban sosial serta menjadi penyebab pokok dari datangnya kemiskinan serta dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan menghalangi perkembangan ekonomi dengan jangka panjang (Depnakertrans, 2014).

Permasalahan penyerapan tenaga kerja menjadi isu yang dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini memiliki jumlah pulau keenam terbanyak di Indonesia, mencapai total 609 pulau, dengan luas wilayah 47.931 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 5.446.285 jiwa pada tahun 2012, dengan kepadatan penduduk mencapai 144 jiwa/km<sup>2</sup>.

Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan. Menurut BPS di bulan Agustus tahun 2020 itu total angkatan kerja pada daerah NTT meraih 2,85 juta orang meningkat 5,56% sejak Agustus 2019 ia mencapai 2,70 juta orang namun peningkatan tersebut tidak disertai oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal, yang tercermin dari peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT dari 3,14% pada Agustus 2019 menjadi 4,77% pada Agustus 2020 (BPS, 2024).

**Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja di NTT tahun 2010-2022**



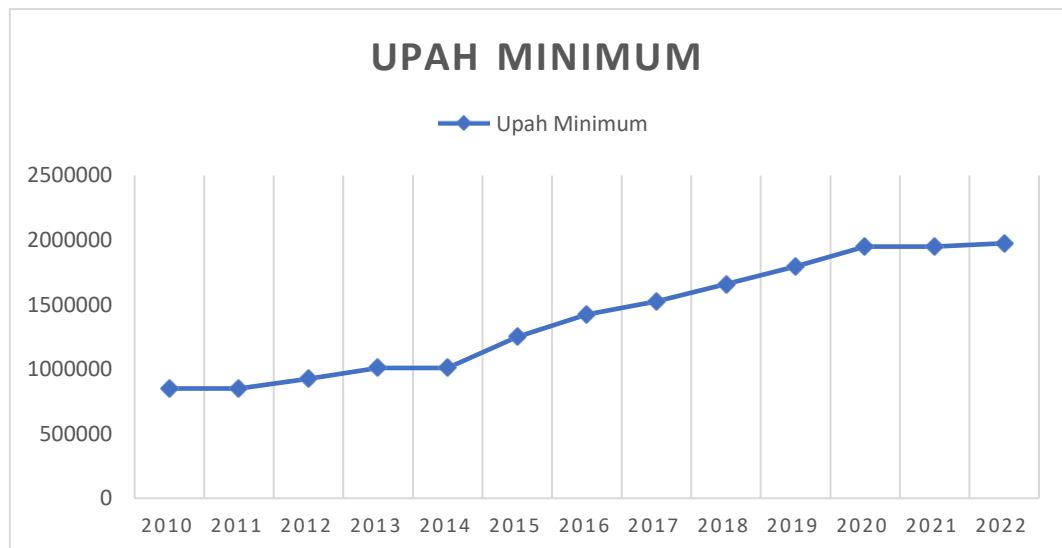
**Gambar 1. 1 TPT dan Angkatan Kerja di NTT tahun 2010-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Dalam Gambar 1.1 terlihat bahwa persentase pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2010-2022 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Dimana persentase pengangguran tertinggi pada tahun 2020 yakni 4,77% dikarenakan pandemi *Covid-19* yang terjadi. Sedangkan pada angkatan kerjanya dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum.

Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Berikut adalah kenaikan tingkat upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya.

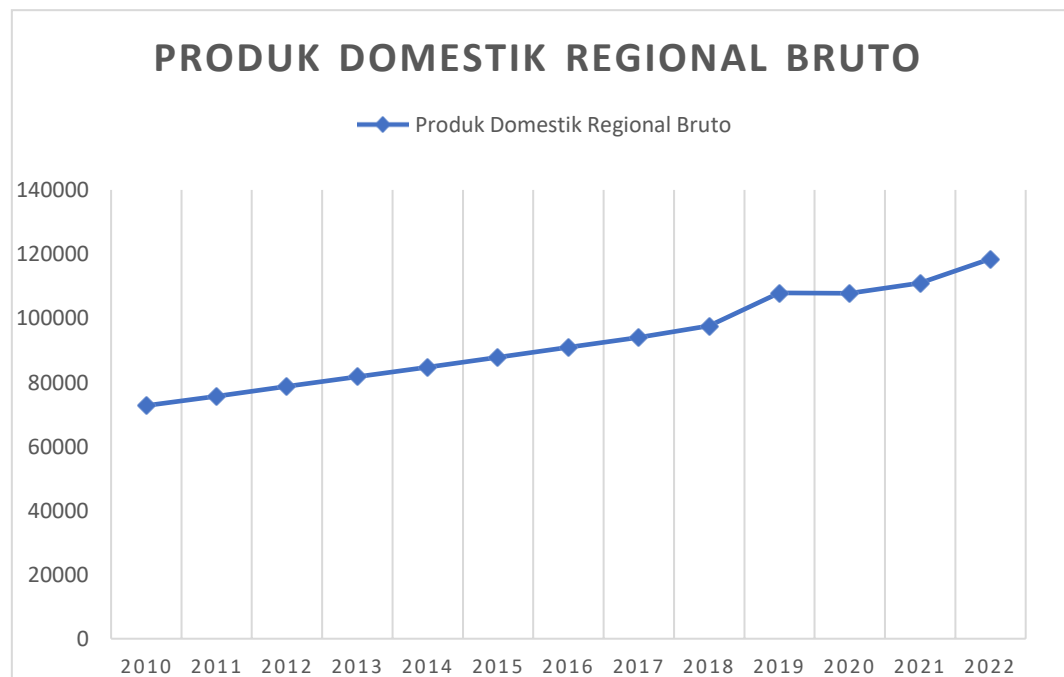


**Gambar 1. 2 Upah Minimum di NTT tahun 2010-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Dari Gambar 1.1 menampilkan tren kenaikan upah minimum pada Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun meskipun terjadi peningkatan secara positif tersebut belum tentu bisa mengurangi angka pengangguran pada wilayah tersebut. Kebijakan upah minimum adalah suatu mekanisme pengupahan yang sudah umum diimplementasikan dan secara mendasar memiliki dua aspek. 1) sebagai bentuk perlindungan untuk bekerja dalam memastikan bahwa penerimaan nilai upah tidak mengalami penurunan yang dapat mempengaruhi keperluan hidup sehari-harinya dan 2) bentuk alat perlindungan terhadap perusahaan dalam menjaga produktivitas para pekerjanya (Sulistiawati, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan isu yang terus dihadapi dalam jangka panjang oleh negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah bisa ditimbang melalui pemantauan pertumbuhan PDRB dalam harga yang konstan mencakup diantaranya nilai tambah atas jasa serta barang sebagai hasil produksi suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (BPS, 2024).



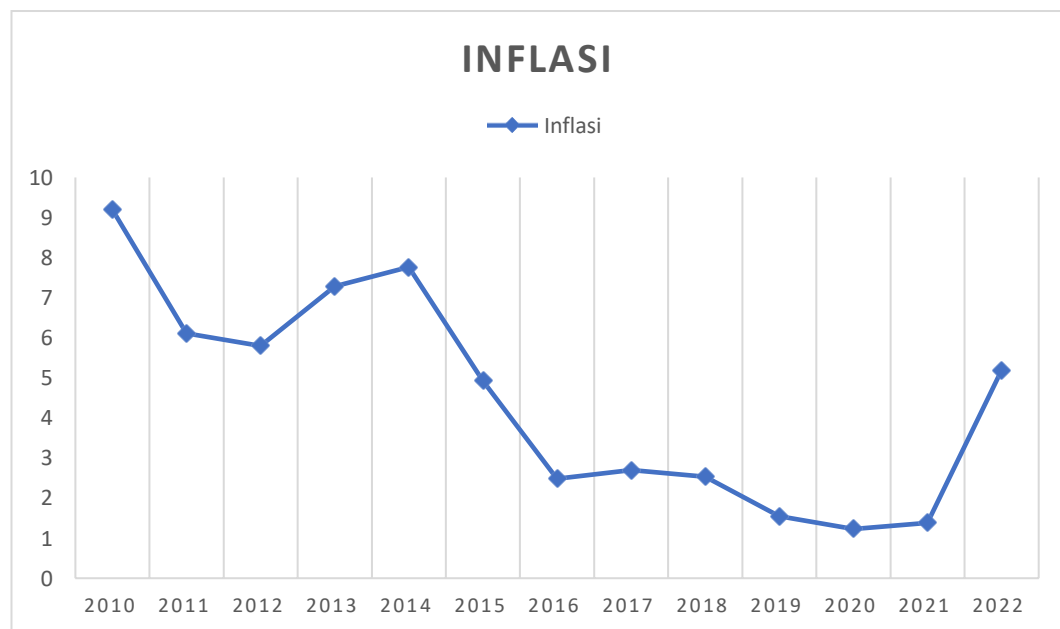
**Gambar 1. 3 PDRB atas dasar harga konstan di NTT tahun 2010-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diukur berdasarkan harga tetap, mengalami peningkatan. Harapannya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dengan upah yang memadai. Namun, meskipun PDRB Provinsi NTT mengalami peningkatan namun absorpsi tenaga kerjanya belum membuktikan adanya signifikansi peningkatan. Melalui signifikansi

pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meraih stabilitas moneter maupun ekonomi secara kokoh dan juga stabil dimana suatu parameter dalam mengevaluasi hal tersebut yakni melalui peningkatan pendapatan perkapita. Penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam menilai peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan populasi harus sejalan dengan penciptaan lapangan kerja, karena jika tidak seimbang, dapat menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pendapatan per kapita.

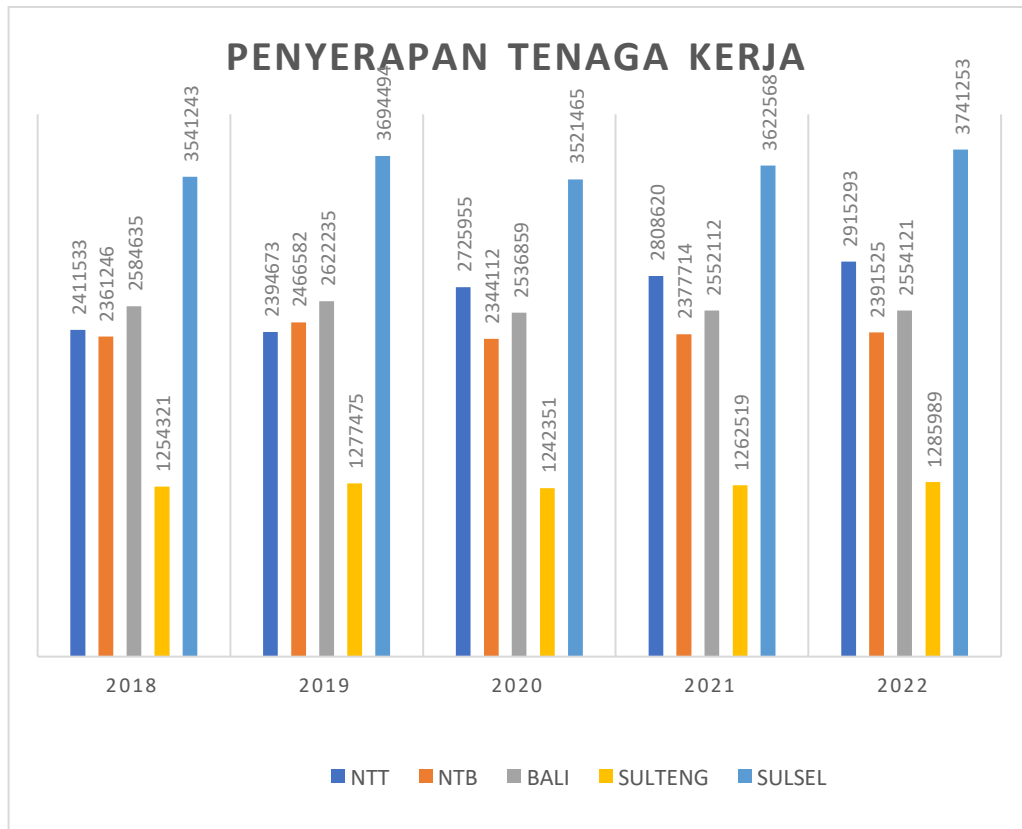
Penyerapan tenaga kerja juga terpengaruh oleh tingkat inflasi. Inflasi dalam perekonomian suatu wilayah memiliki berbagai konsekuensi, termasuk kemampuan inflasi untuk mengubah output dan jumlah tenaga kerja (Nanga, 2005). Hal ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan produksinya, baik meningkatkan atau mengurangi, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi.



**Gambar 1. 4 Inflasi di NTT tahun 2010-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Jika inflasi pada sektor ekonomi masih masuk ke dalam kategori ringan layaknya ditunjukkan pada tabel perusahaan akan berupaya meningkatkan jumlah produksi dan output. Inflasi ringan mampu memotivasi para produsen karena kenaikan harga termasuk ke dalam kategori batas wajar dan kemauan perusahaan untuk meningkatkan output tertentu saja bisa disertai oleh penambahan berbagai faktor produksi layaknya tenaga kerja. Dalam situasi ini maka permintaan akan tenaga kerja akan mengalami kenaikan yang ada pada gilirannya bisa mengoptimalkan penyerapan dari tenaga kerja yang ada serta akhirnya bisa memotivasi atau menopang pertumbuhan ekonomi lewat adanya pendapatan nasional yang meningkat.



**Gambar 1. 5 Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja NTT dengan Provinsi sekitar**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Dari grafik penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan, terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki jumlah penyerapan tenaga kerja yang relatif konsisten dari tahun 2018 hingga 2022, dengan angka yang berkisar antara 2,3 hingga 2,9 juta (BPS, 2024). Dibandingkan dengan provinsi lainnya di sekitar NTT, seperti NTB, Bali, Sulawesi Tenggara (SULTENG), dan Sulawesi Selatan (SULSEL), NTT memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan Sulsel, yang memiliki penyerapan tertinggi setiap tahun, berkisar antara 3,5 hingga 3,7 juta (BPS,2024). Sementara itu, NTB dan Sulteng memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang cukup dekat dengan NTT,



namun masih lebih tinggi, terutama di tahun-tahun tertentu. Bali, di sisi lain, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dari NTT dan provinsi lainnya, dengan angka yang berkisar antara 1,2 hingga 1,3 juta sepanjang periode yang sama (BPS,2024). Hal ini menunjukkan bahwa NTT memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi sekitarnya, terutama jika dibandingkan dengan Sulsel.

Penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan inflasi, meningkatkan PDRB, serta menjaga stabilitas upah minimum. Namun, penyerapan tenaga kerja ini belum dapat sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rochmani, Purwaningsih, dan Suryantoro (2017), hasil estimasi menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara PDRB, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja. PDRB yang tinggi mendorong perusahaan untuk menambah jumlah karyawan guna meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, upah minimum yang tinggi dapat membuat perusahaan enggan menambah jumlah karyawan karena biaya tambahan yang diperlukan untuk membayar upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku (Indradewa & Natha, 2015). Penelitian ini juga menemukan bahwa secara simultan, ketiga variabel tersebut (PDRB, upah minimum, dan inflasi) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Secara parsial, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali (Indradewa & Natha, 2015).

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, terlihat dari perkembangan di berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, industri, dan lain-lain. Selain itu, didukung oleh peningkatan PDRB konstan serta upah minimum setiap tahunnya serta tingkatan inflasi dengan kategori cenderung relatif rendah namun kondisi ini belum mengoptimalkan penyerapan pada tenaga kerja. Situasi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai "Dampak Inflasi, PDRB, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah PDRB berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nusa Tenggara Timur ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil bagi penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan atau manfaat yakni:

1. Untuk masyarakat umum diharapkan mampu menjadi alat dalam memperkaya serta meningkatkan wawasan maupun ilmu pengetahuan dan bahan studi secara komparatif dengan penelilaian lainnya berkenaan terhadap analisis berbagai Faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang di provinsi NTT.
2. Untuk almamater penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kebendaharaan pada perpustakaan yang menjadi referensi untuk mahasiswa dalam mempelajari topik serupa terhadap penelitian ini.
3. Untuk instansi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tambahan untuk pemerintah daerah maupun pusat yang menjadi masukan pada perumusan kebijakan kedepannya dalam mengatasi persoalan pengangguran.